



## Pengasuh Daycare Lakukan Kekerasan Atas Perintah Atasan

YOGYAKARTA - Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, mengungkap praktik yang diduga berlangsung lama dan sistematis. Polisi menyebut tindakan tersebut dipicu motif ekonomi, yakni menampung anak melebihi kapasitas tanpa memperhatikan standar pengasuhan.

Penyidikan Satreskrim Polresta Yogyakarta menemukan sebanyak 11 pengasuh mengaku melakukan kekerasan atas perintah langsung ketua yayasan. Perintah itu disampaikan secara lisan dan kemudian menjadi pola yang berlangsung terus-menerus.

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Riski Adrian, mengatakan praktik tersebut sudah berjalan

(Bersambung hlm 5 kol 1)



Arifatul Choiri Fauzi

SM/Antara Foto/Andreas Fitri

### FAKTA KELAM DAYCARE DI INDONESIA



Belum memiliki izin atau legalitas yang jelas



Memiliki izin operasional



Memiliki tanda daftar



Berbadan hukum



Belum memiliki standar operasional prosedur (SOP)



SDM pengelolanya belum tersertifikasi

Sumber: Menteri PPPA, Arifah Fauzi

## Pengasuh...

(Sambungan hlm1)

lama dan diwariskan antar pengasuh. "Tindakan itu dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan," ujarnya. Selasa (28/4).

Dari hasil penyelidikan, kekerasan diduga terjadi sejak anak datang. Korban disebut dilepas pakaiannya, diikat, dan hanya dilepas saat makan atau mandi. Hasil visum terhadap tiga korban menunjukkan adanya luka pada pergelangan tangan yang mengindikasikan praktik pengikatan.

Polisi juga mengamankan bukti digital berupa foto-foto kekerasan yang sempat

beredar di media sosial. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia memastikan bukti tersebut sah secara hukum.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan 13 tersangka, terdiri atas 11 pengasuh, ketua yayasan, dan kepala sekolah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP baru dengan ancaman hukuman hingga delapan tahun penjara.

Motif sementara mengarah pada faktor ekonomi. Pengelola diduga memaksimalkan jumlah anak tanpa memperhatikan rasio pengasuh. Dalam praktiknya, satu pengasuh menangani hingga 7-8 anak, melebihi standar ideal.

Kasus ini memicu respons luas. Ketua

DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putro, menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi perlindungan anak di ruang publik. Menurutnya, predikat Kota Layak Anak harus diikuti jaminan bebas dari kekerasan.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan 15 daycare rujukan untuk menampung korban sekaligus memberikan pendampingan psikologis. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan pemulihan trauma anak menjadi prioritas.

Di tingkat provinsi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan penutupan seluruh daycare yang tidak berizin. Pemerintah juga melakukan pendataan ulang serta penyusunan standar

operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat.

Data menunjukkan terdapat 217 taman penitipan anak (TPA) resmi di DIY. Namun secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat masih banyak daycare belum memenuhi standar. Sekitar 44 persen belum memiliki izin, hanya 30,7 persen yang berizin operasional, dan sebagian besar belum memiliki SOP maupun tenaga tersertifikasi.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyatakan kasus di Yogyakarta harus menjadi momentum evaluasi nasional. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat regulasi, perizinan, dan pengawasan agar

perlindungan anak di daycare lebih terjamin.

Sementara itu, aparat kepolisian juga meningkatkan pengawasan di sejumlah daycare. Dari hasil pemantauan di beberapa lokasi di Kota Yogyakarta, situasi terpantau aman dan tidak ditemukan indikasi kekerasan. Meski demikian, kasus ini menyisakan trauma mendalam bagi korban dan keluarga.

Sejumlah orang tua mengaku anak mereka mengalami perubahan perilaku dan ketakutan setelah kejadian tersebut. Pemerintah pun diminta memastikan penanganan hukum berjalan tegas sekaligus menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. (J19-64)

| Instansi  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota<br>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan<br>Perlindungan Anak dan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005